

DIMENSI KEADILAN DALAM EPISTIMOLOGI AKUNTANSI SYARIAH

Ery Wibowo

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstrak

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritakanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Pada hari di mana di panaskan semua emas dan perak dalam neraka jahanam, lalu di bakar dengan dahi, lambung, dan punggung mereka

Kata Kunci : epistimologi, konsep laba, zakat, keadilan, akuntansi syariah

PENDAHULUAN

Hampir semua model pembangunan Barat yang dipakai di negara berkembang termasuk Indonesia menolak pembangunan manusia dan peran agama sebagai bagian dari pembangunan. Malah agama dianggap sebagai penghalang kemajuan teknologi dan modernisasi. Menurut teori ekonomi klasik, masalah moral dianggap selesai dengan sendirinya ketika setiap individu melakukan kebaikan umum. Ini jelas terlalu meremehkan situasi. Pada umumnya, manusia yang mencari keuntungan akan menjadi rakus sehingga kebaikan umum diabaikan sama sekali dan seterusnya sehingga mengakibatkan ketidakadilan (ekonomi) dalam masyarakat. Sedangkan bagi teori klasik baru, persoalan moralitas dikesampingkan dan digantikan dengan konsep utilitas yang dipinjam dari filsafat liberal utilitarianisme Bentham dan Mill.

Under this frame work, acting ethically means making decisions and taking actions that benefit people by maximimizing 'good' and minimazing 'bad'.(Jeremy Bentham and John Stuard Mill,(http://nete.danedsfund.org/ethics/section_two)

Sedangkan Keynes ingin mengembalikan moralitas dalam teori ekonomi, tetapi kelemahannya sistim etika hanya didasarkan pada filsafat rasional dengan mengabaikan agama hanya akan berahir dengan kekeringan moral, sebab ketiadaan kekuatan rohani dan juga tanpa panduan agama (teologi) dalam pengertian syariah (formal) maupun dalam pengertian esoteri (ruhaniah), maka sistim ekonomi 'seilmiah dan semodern' apa pun hanya akan berpihak pada kepentingan materi semata. Sistim seperti ini akan melahirkan kesenjangan sosial dan ekonomi

yang berujung pada akumulasi kekayaan yang ‘abnormal’ pada segelintir orang. Ketidakadilan sosial ekonomi ini tidak hanya membuat kesenjangan antara antar individu tetapi juga kesenjangan global antara negara berkembang dengan negara maju. Dalam konteks peradaban ekonomi seperti inilah ilmu akuntansi konvensional dilahirkan. Menurut Yuri Ijiri, bahwa akuntansi mempunyai tujuan ganda yang secara prinsip dibedakan menjadi dua :

1. *Equity accounting*, yaitu untuk melindungi ekuitas pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. (*stakeholder*)
2. *Operational accounting*, yaitu untuk memberikan informasi guna pengambilan keputusan usaha.

Bentuk akuntansi itu sendiri sebetulnya banyak dipengaruhi oleh paradigma yang mendasarinya dan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi, politik, sosila dan budaya di mana akuntansi tersebut dipraktikkan. Dalam kaitannya dengan hal ini Violet (1983, p.8) mengatakan: *Accounting is social institution established by most cultures to report and explain certain social phenomena occuring in economic transactions. As a social institution, accounting has integrated certain cultural customs and elements within the constraints of cultural postulates. Accounting can not be isolated and analyzed as an independent component of culture. It is, like mankind and other social institutions a product of culture and contributes to the evolution of the culture which employs it. Since accounting is cultrally determined, other cultural customs, beliefs, and institutions influence it.* (dalam Financial Accounting Theory, 175)

Paradigma yang berbeda dapat menghasilkan bentuk akuntansi yang berbeda. Dalam wacana akuntansi sampai saat ini terdapat *paradigma positivisme*, *paradigma normative*, *paradigma interpretivisme*, *paradigma kritis*, kemudian belakangan muncul *paradigma postmodernisme* dan *pardigma Islam*. Masing – masing paradigma kehadirannya tidak bisa menghilangkan begitu saja atau ‘menggusur’ paradigma lain. Sebaliknya kehadiran berbagai macam paradigma ini dapat disikapi secara positif dalam rangka memperkaya khasanah kepustakaan ilmu akuntansi.

Akuntansi syariah yang lahir dari paradigma Islam dalam konstruksinya dibangun berdasarkan konsep nilai zakat. Hal ini erat kaitanya dengan konsep kepemilikan harta (asset) dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam agama Islam jelas sangat berbeda dengan konsep kepemilikan menurut kapitalisme. Hak milik pribadi merupakan dasar (fundamen) dari

kapitalisme yang tercermin dalam laporan keuangan dimana equitas merupakan proksi hak kepemilikan yang diakumulasi. Dalam kapitalisme produsen tampak sebagai pelaku yang memasuki pasar yang membeli tidak apa yang dibutuhkan tapi apa yang tidak dibutuhkan untuk kepentingannya. Dia membeli untuk menjual kembali dalam rangka akumulasi atau penumpukan laba. Secara psikologis situasi ini menciptakan kondisi tidak nyaman, secara moral juga kurang memadai karena memberi hak kepada mereka yang tidak “berkeringat” atau tidak berbuat apa-apa untuk memperoleh *abnormal return* atau keuntungan yang berlipat ganda. Hak-hak ini berkaitan dengan kegiatan usaha. Jelas secara ekonomi sistem ini tidak bisa mendistribusikan kekayaan yang diciptakannya secara adil.

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam dan fundamen dalam muammalah (aktivitas bisnis/ekonomi) secara tegas telah mengatur ketentuan tentang kepemilikan. Dalam surat Ali Imron : 189 yang menyatakan :

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.

Allah adalah penguasa alam semesta dan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ayat ini menekankan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah dimiliki secara kolektif oleh seluruh manusia. Secara hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindahkan tanggungan kekayaan yang diakui dan dipelihara, tetapi manusia mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaannya itu merupakan hak dari sebagian masyarakat. Seperti yang tercermin dalam surat Adz Dzariat : 19:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. (Tafsir Alqur'an, Departemen Agama)

Dalam syariat Islam dengan jelas dan tegas telah mengatur prinsip kepemilikan yang meliputi : pemanfaatan kekayaan, pembayaran zakat, penggunaan yang berfaedah, penggunaan yang tidak merugikan, pemilikan yang sah, penggunaan berimbang, pemanfaatan sesuai dengan hak, dan kepentingan kehidupan. Sehingga dalam prinsip syariah Islam ini tidak diperbolehkan manusia memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Orang yang menguasai tanah yang tidak bertuan tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.

Hamid, Craig and Clarke, (1993) menyatakan *..that the Islamic tradition does have notions of stewardship-but to God rather than to suppliers of equity or debt capital. That is, Muslim believe that they hold assets not for themselves, but in trust for God.* (dalam *Financial Accounting Theory*, 185)

Dalam kaitan tersebut, akuntansi syariah mencoba membangun sebuah epistemologi ilmu Akuntansi yang berdemensi ruhaniah dan berpihak pada keadilan ekonomi. Dalam konstruksinya akuntansi syariah menggunakan metafora amanah dan metafora zakat. Konsekwensinya, akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada konsep nilai zakat. Konsep dan nilai zakat ini diartikan secara lebih spesifik sebagai sebuah metode untuk menjabarkan filosofi keadilan dalam Islam.

EPISTEMOLOGI

Epistemologi ialah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakekat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan (validitas) pengetahuan. Ia lebih mendasar dari pada metodologi. Karena itu asumsi-asumsi epistemologis suatu bentuk pengetahuan tercermin pada metodologi yang diterapkan dalam pengembangan pengetahuan tersebut. Landasan epistemologis menentukan cara-cara yang dipakai untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. (Prof. Imam Ghazali, 5)

Perkembangan penelitian dibidang akuntansi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Akhir-akhir ini telah terjadi pergeseran yang cukup tajam dari pendekatan klasikal atau sering disebut dengan *mainstream aproach* atau positivisme ke pendekatan yang lebih radikal yaitu dengan meminjam berbagai metodologi ilmu sosial lain. Pendekatan dengan meminjam basis metodologi ilmu sosial lain ini sering disebut dengan pendekatan alternatif. Walaupun pendekatan *mainstream* masih mendominasi (normative dan positivisme) penelitian akuntansi hingga saat ini, sejak tahun 1980-an telah muncul usaha-usaha baru untuk menggoyang pendekatan *mainstream*. Sebagai gantinya, mulai bermunculan pendekatan penelitian akuntansi yang meminjam dari ilmu-ilmu sosial lain seperti filsafat, sosiologi, antropologi bahkan pendekatan teologis.

Epistemologi akuntansi syariah ini meskipun belum bisa dikatakan merupakan pendekatan alternatif dalam akuntansi, tetapi boleh dianggap sebagai 'perspektive lain' dalam memahami ilmu akuntansi dengan menggunakan pendekatan elaborasi ajaran dan pesan moral

agama (Islam). Meskipun secara teknis, akuntansi syariah masih melakukan ‘singkritisme’ (mencangkok) dengan metode akuntansi konvensional, namun ditingkat epistemologis konsep-konsep yang coba ditawarkan dapat memberi warna tersendiri dalam perkembangan ilmu akuntansi yang secara konsep berbeda ditingkat epistemologis dengan akuntansi konvensional.

KONSEP LABA

Penentuan laba (*Income*) merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi konvensional, dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan. Bonus karyawan dan deviden kepada investor banyak dibagikan atas dasar besarnya laba yang dapat dihasilkan. Laba juga merupakan ukuran usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan atas dasar kinerja pekerjaannya. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi. Laba per saham (*earning per share*) yang berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting di mana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.

Definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang berkaitan (biasanya dalam waktu tahunan). Proses pengaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misalnya kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan nilai sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer,

Konsep laba akuntansi (*accounting income*) adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Harahap 1997, 147; Belkaoui 1997, 223) Dari definisi tersebut, Belkaoui (1997,223) mengemukakan lima ciri khas laba akuntansi yaitu :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut).

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulate periode dan berhubungan dengan prestasi keuangan perusahaan itu selama periode waktu tertentu.
3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan membutuhkan definisi pengukuran, dan pengakuan pendapatan
4. Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk biaya historis bagi perusahaan yang melahirkan kepatuhan dan ketaatan pada prinsip biaya.
5. Laba akuntansi mensyaratkan agar pendapatan yang direalisasi dari periode itu dikaitkan pada biaya relevan yang tepat atau sepadan (prinsip *matching*)

Financial Accounting Standard Board (FASB) lebih jauh lagi mengemukakan sebuah konsep laba konperhensif (*comprehensive income*), sebagai berikut :

Comprehehsive income it stated that earnings could be defined later as possibly a component of comprehensive income.

Dalam kaitannya dengan hal ini Loudell Ellis Robinson menyatakan :

Comprehensive income is earnings as defined, plus or minus cumulative accounting adjustments, plus or minus other non owner changes in equity. (Loudell Ellis, 109)

+ *Earnings*

± *Cumulative Accounting Adjustments*

± *Other Non owner Changes in Equity*

= *Comprehensive income*

Cumulative accounting adjustments may include adjustments due to a change in accounting principle, a change in accounting estimate, or other changes that may be identified later.

Konsep laba akuntansi diterima oleh banyak kalangan. Beberapa hal yang mendukung argumen - argumen laba akuntansi sebagai berikut (Belkaoui 1977, 233) :

1. Laba akuntansi telah bertahan terhadap pengujian sang waktu. Sebagian besar pemakai data akuntansi percaya bahwa laba akuntansi berguna dan merupakan faktor penentu dalam praktik dan pola pikir bagi para pengambil keputusan.
2. Laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objective dan oleh karena itu pada hakekatnya dapat di audit. Objectivitas pada umumnya diperkuat oleh keyakinan para penyokong pengguna laba akuntansi bahwa akuntansi harus melaporkan fakta bukan nilai.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (1994) mengemukakan definisi pengukuran sebagai berikut :

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar tertentu.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menyebutkan berbagai dasar pengukuran sebagai berikut :

Biaya historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Tokoh yang paling bersemangat mempertahankan konsep biaya historis adalah Yuri Ijiri, dia menyatakan bahwa biaya historis telah teruji lama karena telah dipraktikkan berabad-abad.

It truly remarkable that historical cost accounting has been the principal methodology of accounting over several countries. (Ijiri,1971, 1)

Biaya Kini (*current cost*). Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang didiskontokan (*undiscounted*) yang memungkinkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

Nilai realisasi (*realizable/settlement value*). Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly roposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Nilai sekarang (*present value*). Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan

yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Dari keempat dasar pengukuran tersebut, dalam pelaksanaannya yang paling banyak digunakan adalah dasar biaya historis, yang biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai bersih (*lower of cost or net realizable value*), akuntansi dana pensiun menilai aktiva tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

LABA DALAM KONTEKS ISLAM

Konteks laba dalam Islam menempati posisi yang unik manakala ia dihadapkan pada ketentuan syariah, bahwa riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Larangan tersebut tertuang dalam tafsir Al – Quran : (QS 3 : 130),(QS 4: 161),(QS 2 : 275-279). Konsideran dalam hadist nabi Riwayat : (HR Bukhori, Muslim, dan Ahmad), juga dalam (HR Muslim dan Nasai). Lebih jauh lagi dalam (QS 4 : 161) dikatakan :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia , maka riba itu tidak akan menambah ada sisi Allah. Dan jika apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapat keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Adalah satu kenyataan bahwa dalam praktik ekonomi, dikenal konsep diskonto dalam analisis modal dan investasi. Penggunaan model *Net Present Value* (NPV), *Cost Benefit Analysis*, *Internal Rate of Return* (IRR), deviden model dalam asset valuation merupakan bentuk-bentuk diskonto dalam *time value of money*. Ketika dinyatakan bahwa sistem bunga dilarang dalam Islam muncul permasalahan berkaitan dengan penggunaan diskonto ini.

Konsep laba dalam pendekatan *historical cost* secara implisit mengakui adanya *time value of money*. Hal tersebut berkaitan erat dengan konsep kepemilikan sumberdaya dalam *historical cost*. Sedangkan konsep laba dengan pendekatan *business income* mengakui unsur bunga dalam perhitungan *rate of return* atas aktivitas investasi yang dilakukan. Penggunaan *cost of capital* sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan keuangan untuk melakukan investasi berkaitan erat dengan sistim penilaian atas aktiva yang diinvestasikan. Konsep laba dengan pendekatan *historical cost* dan *business income* tidak menjadikan *cost of capital* sebagai bahasan utama dalam konsep kepemilikan modal. *Historical cost* dan *business income* cenderung

menggunakan konsep *capital maintenance* berkaitan erat dengan dasar penilaian yang digunakan oleh masing-masing konsep. *Historical cost* menggunakan *capital maintenance* dikaitkan dengan dasar nilai historis dimana pemeliharaan aktiva akan menunjang produktivitas perusahaan. Sedangkan *business income* menggunakan *capital maintenance* dikaitkan dengan dasar nilai sekarang, sehingga menghasilkan *true income* yang akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak dikenal adanya bunga dan *time value of money*, mengingat bunga meruakan riba. Konsep laba *historis cost* tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena menggunakan konsep *time value of money* dalam aksioma kepemilikan sebagai dasar dalam konsep penilaiannya. Sehingga menggunakan unsur bunga dalam perhitungan dalam perhitungan *cost of capitalnya*. *Historical cost* selama ini hanya membuat perkiraan terhadap kejadian yang akan datang berdasarkan pengukuran dengan nilai historis. Perkiraan tersebut menggunakan unsur bunga dan *time value of money* yang bersifat mutlak dan pasti. Padahal masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Sehingga Islam sangat menentang faktor-faktor kemutlakan atau kepastian seperti yang tercantum dalam al quran (QS Luqman : 34).

Sedangkan pendekatan konsep laba dengan pendekatan *business income* lebih sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena bunga yang digunakan dalam perhitungan *cost of capital* mengarah pada perhitungan *rate of return* atas kegiatan investasi yang dilakukan. Hal ini ditunjang oleh pengakuan konsep *business income* atas *opportunity cost* dalam penilaian terhadap investasi yang dilakukan dimana konsep syariah juga mengakuinya. *Business income* menggunakan nilai kini atau *current value* sebagai dasar penilaian aktiva yang menjadi objek zakat. Zakat sendiri menggunakan *current value* sebagai dasar penilaian atas aktiva atau harta yang dimiliki untuk dikenai kewajiban zakat. *Current value* sebagai dasar penilaian dapat digunakan dalam praktik akuntansi dengan menggunakan *net realizable value* atau *replacement cost* yang ditunjukkan oleh nilai pasar atas aktiva yang bersangkutan, sehingga nilai yang dihasilkan berupa nilai saat ini yang setara dengan nilai kas atas aktiva atau aktiva yang bersangkutan.

Kelemahan penggunaan nilai pasar dari masing-masing aktiva adalah tidak adanya pasar yang segera untuk banyak aktiva yang dimiliki perusahaan. Karena banyak barang pada pabrik dan peralatan, satu-satunya harga pasar yang tersedia mungkin merupakan nilai likuiditas.

AKUNTANSI SYARIAH

Tujuan dalam ekonomi dan akuntansi syariah adalah penegakkan keadilan, kesejahteraan (sosial dan ekonomi) dan perlindungan terhadap kepemilikan. Dasar munculnya akuntansi syariah adalah implementasi dan elaborasi dari tafsir surat Al Baqoroh : 282. Yang didalamnya mengatur tata cara muammalah, seperti kegiatan berjual beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Sebuah perusahaan pasti tidak akan lepas dari aktivitas muammalah seperti tersebut dalam tafsir surat Al Baqoroh, karena itu, maka pemeliharaan akuntansi (syariah) hukumnya wajib .

Tujuan akuntansi syariah berdasar ada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ummat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan kepada seorang atau segolongan orang saja. Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistim *zakat, infak, shodaqoh*, dan sistim monoter tanpa bunga. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dalam konsep Islam bukanlah kebaikan hati atau *charitable*. Dalam Islam, walaupun harta kita cari dengan usaha ‘keringat’ sendiri secara halal, tetap saja dalam harta kita tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jadi kalau ada orang kaya bayar zakat itu belum bisa dikatakan dermawan, karena apa yang diberikannya itu adalah bukan hak milik pribadinya. Tujuan akuntansi syariah sejalan dengan Tafsir Quran dan Hadist (sunnah rosul), dan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Secara makro tujuan akuntansi syariah (hameed, 2000,17) adalah :

1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat.
2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
3. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat islami dan laba yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Dalam metafora zakat seperti ini, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat, ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan ahir (*the ultimate goal*) perusahaan. Didalamnya terkandung perpaduan yang seimbang antara karakter pengejaran utility perusahaan sekaligus juga nilai altruistik (sosial), perpaduan antara nilai-nilai profan (duniawi) dengan nilai-nilai suci (ukhrowi). Sekaligus merupakan simbol pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia, dan manusia terhadap alam. Unsur-

unsur etika, keadilan, humanis, keselarasan dengan alam merupakan ciri utama yang menonjol dalam akuntansi syariah.

ZAKAT DAN KEADILAN

Menurut Al-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara linguistik memiliki makna ganda, yaitu pertumbuhan (*growth*) dan juga pembersihan (*purification*). Makna pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan (*wealth*) dan juga pahala (*reward*) bagi yang melakukan. Sedangkan makna kedua zakat akan membersihkan jiwa manusia dari keinginan memiliki kekayaan secara berlebihan. Menurut Chapra (2000,270) menyatakan bahwa zakat mempunyai makna literal, yaitu penyucian (*thaharah*), pertumbuhan (*nama'*), keberkatan (*barokah*), dan pujian (*madh*). Secara teknik zakat pada hakekatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya jika kekayaan itu melebihi batas nisab, suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. Zakat dikenakan pada kekayaan yang memiliki nilai (*market value*) di mana fungsi zakat itu sendiri adalah satu cara untuk mencegah penimbunan harta yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth*. Mannan (1997,256) menyatakan bahwa zakat adalah poros keuangan negara islami. Dalam bidang moral zakat berusaha mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial zakat berindak sebagai alat yang khas milik Islam yang untuk menghapuskan kemiskinan dengan menyadarkan pada si kaya akan tanggung jawab sosialnya.

Konsep zakat berbeda dengan konsep pajak. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan itu sendiri. Apabila biaya pungutan itu melebihi hasil pungutan itu sendiri maka pajak itu menjadi tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis. Sedangkan zakat tidak memerlukan sistim organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya besar. Zakat merupakan bentuk ibadah yang tidak membutuhkan biaya yang besar. Zakat tidak memerlukan suatu bentuk undang-undang yang memaksa orang Islam, pada umumnya orang membayarnya secara ikhlas karena mencari ridha Allah. Dalam prinsip kepastian, zakat dan ketentuannya tidak boleh diubah atau dimodifikasi dengan suatu aturan pemerintah karena sanksinya tertuang di dalam al- Quran dan Sunnah. Jadi zakat memiliki keuntungan tertentu dibandingkan dengan perpajakan modern. Dalam perpajakan modern orang cenderung menghindari atau memanipulasi data keuangan untuk menghindari perpajakan. Hal ini sangat kecil kemungkinannya terjadi dalam zakat dengan sikap religio-ekonomiknya yang ingin

ditegakkan. Zakat mendorong kecenderungan pelaku ekonomi menginvestasikan harta kekayaannya untuk tujuan produktif di sektor riil.

Akuntansi merupakan cermin bangunan realitas organisasi etis, baik organisasi yang berbentuk sosial maupun bisnis. Akuntansi syariah juga mencerminkan nilai-nilai etis syariah yang menggambarkan dan mengakomodir sifat dari organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini zakat merupakan realitas yang hendak diungkapkan dalam akuntansi syariah. Sehingga dapat dipahami, zakat sebagai *metamorfosis* realitas etis bagi organisasi bisnis tersusun atas dimensi fisik (materi) dan metafisis (non materi). Kedua hal tersebut akan menghasilkan konstruksi bangunan akuntansi syariah. Jadi akuntansi harus mencerminkan semua nilai tersebut di atas. Ketika akuntansi merefleksikan sebuah realitas nilai tertentu dalam agama (Islam), akan ada informasi dan simbol yang kemungkinan bervariasi dengan praktik – praktik akuntansi dalam organisasi bisnis kontemporer dan juga konvensional. Disinilah kemudian epistemologi dan praktik akuntansi syariah mengalami hubungan dialogis dengan dunia ‘luar’, dunia profan yang sekuler. Perlahan tapi pasti akuntansi syariah akan mengalami proses evolusi ke dalam bentuknya yang *establish*, kokoh sebagai bangunan ilmu akuntansi yang diharapkan mampu mewujudkan lahirnya tata dunia yang adil. (wallahu’alam)

DAFTAR PUSTAKA

-, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Penerbit CV Taha Putra , Semarang.
-,2007, *Accounting Theory Seminar* (kapita selekta diktat kuliah), Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Abdel-Fattah A.A Khalil, Colin Rickwood, Victor Murinde, 2000, *Agency Contractual Problem in Profit-Sharing (Mudharabah) Finacing Practices by Interst-Free Bank*, Departement of Accounting and Finance, Brimingham Business School, The Universitas Birmingham, Edgbaston United Kingdom.
- Belkoui, Ahmed. 1997. *Teori Akuntansi..* (ter. Dukat, Erwan, et. Al). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Eldon S Hendriksen, Michael F van Breda, 1999, *Teori Akunting*, Southern Methodist University.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2006, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Iwan Triuwono, Moh. As'udi, 2001, *Akuntansi Syariah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kahar Masyur, 1999, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Kalam Mulia, Jakarta
- Mannan, M. Abdul 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf. Jogjakarta.
- Mas'udi, Masdar F 1991. *Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak)*. Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Siregar, Mulya E. 2000. *Zakat dan Pola Konsumsi Islami*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Vol. 2 Nomor 3 Bank Indonesia. Jakarta.
- Umer Chapra, 2000, *Sistem Moneter Islam*. Penerbit, Tazkia Cendikia, Jakarta